

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
الملخص	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Masalah.....	10
D. Manfaat Penelitian	10

E. Penegasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Alih Status Pegawai.....	21
B. Komisi Pemberantasan Korupsi	25
C. Aparatur Sipil Negara	36
D. Teori Independen	51
E. Politik Hukum.....	67
F. Penelitian Terdahulu	78
BAB III TUJUAN HISTORIS REGULASI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	
A. Pemberantasan Korupsi dari Masa ke Masa.....	87
B. Politik Hukum dan Capaian Perubahan Pemberantasan Korupsi dari masa ke masa	93
C. Kondisi Pemberantasan Korupsi di Negara Lain	100
BAB IV IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KPK TERHADAP KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN	106
A. Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Terhadap Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi	106
B. Implikasi Perubahan KPK Terhadap Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi	118

C. Kelembagaan dan Kepegawaian Independen Commission Againsts Corruption (ICAC).....	130
D. Melemahnya Lembaga Suruhanjaya di Malaysia.....	137
E. Analisis	140
 BAB V POLITIK HUKUM YANG IDEAL TERKAIT UNDANG- UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	145
A. Landasan Hukum Proses Alih Status Pegawai KPK.....	145
B. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	154
 BAB VI PENUTUP	174
A. Kesimpulan	174
B. Saran	176
 DAFTAR RUJUKAN	178